



**PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAYARAN  
UTANG DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 MELALUI  
PUTUSAN PERDAMAIAN PKPU**

**(Studi Kasus Putusan PKPU Nomor:  
46/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst )**

**SKRIPSI**

**NANDIEN DWIPUTRI  
1910611011**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2023**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAYARAN  
UTANG DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 MELALUI  
PUTUSAN PERDAMAIAN PKPU**

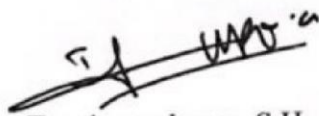
**(Studi Kasus Putusan PKPU Nomor: 46/Pdt.Sus-  
PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst )**

**NANDIEN DWIPUTRI  
1910611011**

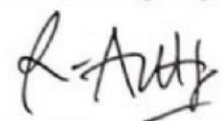
Skripsi/Memorandum hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan  
Tim Penguji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 03 Januari 2023

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

  
Taupiqqurahman, S.H., M.Kn  
NIP. 198701022019031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

  
Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH  
NIP. 1972102620212012005



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI SI - ILMU HUKUM

---

PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Nandien Dwiputri  
NPM : 1910611011  
Program Studi : SI Hukum  
Judul : Penyelesaian Sengketa Penundaan Pembayaran Utang Dengan Alasan Pandemi Covid-19 Melalui Putusan Perdamaian PKPU (Studi Kasus Putusan PKPU Nomor: 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi SI Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua

(Dr. Abdul Halim, M.Ag.)

Anggota 1

Heru Suyanto, SH, MH.

Anggota 2

Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH.

Dekan

(Dr. Abdul Halim, M.Ag.)

Kaprodi

Triprajurahman, S.H., M.Kn.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 16 Januari 2023

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum\*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Nandien Dwiputri

N.I.M. : 1910611011

Tanggal : 2023.....

Tanda Tangan :



Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nandien Dwiputri  
NIM/NPM : 1910611011  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/~~Memorandum Hukum~~\*)  
Judul : PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN  
PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN  
PANDEMI COVID-19 MELALUI PUTUSAN  
PERDAMAIAN PKPU (Studi Kasus Putusan PKPU  
Nomor: 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/~~memorandum hukum~~\*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memorandum hukum~~\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum hukum~~\*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 3 Januari 2023

Yang menyatakan,

  
( NANDIEN DWIPUTRI )

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT. yang Maha Mulia lagi Maha Berkuasa. Puji syukur peneliti panjatkan hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan kebaikan dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PUTUSAN PERDAMAIAN PKPU (Studi Kasus Putusan PKPU Nomor: 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst )" dengan semaksimal mungkin. Penyusunan skripsi ini tentu tidak bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mempersembahkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak awal penyusunan hingga skripsi ini selesai dikerjakan. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT., Tuhan semesta alam yang memberi petunjuk, kekuatan serta kesabaran bagi penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Tofik Hidayatulloh dan Ibu Widiyant, selaku kedua orang tua penulis, Esa, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi dan senantiasa mendukung penulis baik dalam bentuk moriil maupun materi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Anter Venus., Ma., Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak Taupiqurrahman, S.H, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH. Selaku Dosen pembimbing yang tidak pernah bosan membantu mengarahkan, membuat penulis percaya, dan selalu memotivasi dalam proses menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum, yang telah berjasa mendidik dan memberikan ilmunya bagi penulis baik secara akademik maupun nonakademik sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat SMP dan SMA Penulis, yang telah mendukung dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi penulis.
9. Sahabat “Sans” Penulis yang telah memberikan banyak informasi, dukungan, serta menemani penulis semasa perkuliahan hingga kini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis.

Penulis menyadari penuh bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan serta masih banyak kekurangan. Penulis berharap skripsi ini dapat membantu dan berguna bagi penelitian maupun yang lainnya.

Jakarta, 4 Januari 2023

Nandien Dwiputri

## ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kerugian di berbagai bidang khususnya ekonomi. Dampak pandemi Covid-19 ini mengakibatkan hanya 58,95% perusahaan mampu beroperasi secara normal, bahkan sebanyak 82,45% perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional sebagai dasar hukum *force majeure*. Dengan banyaknya perusahaan yang berdampak ini peningkatan perkara pailit dan PKPU terjadi karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor akibat Covid-19. Misalnya tidak menjalankan kewajiban, seperti membayar utang akibat situasi keuangan perusahaan yang menurun. Seperti pada kasus Putusan Perdamaian PKPU Nomor: 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dimana berdasarkan pada kasus tersebut diketahui Debitor tidak dapat memenuhi kewajiban prestasinya dikarenakan salah satu alasannya yaitu terdampak oleh Covid-19. Maka berdasarkan pada permasalahan tersebut penulis memperoleh rumusan masalah yaitu: Apakah kondisi pandemi Covid-19 dapat menjadi alasan untuk menunda pembayaran utang oleh debitor dan bagaimana pelaksanaan putusan perdamaian PKPU Nomor 46/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam kasus permohonan penundaan pembayaran utang. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengungkap pada teori-teori serta peraturan perundangundangan. Serta menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan dan kasus yang dikasi dengan berdasarkan pada sumber data hukum primer dan sekunder. Dilengkapi dengan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak serta merta dapat menghilangkan kewajiban debitor untuk memenuhi prestasinya bilamana pandemi Covid-19 dinyatakan oleh pemerintah telah berakhir. Dan dalam putusan PKPU tersebut, syarat keempat tidak terpenuhi karena baik debitor dan kreditor sama-sama mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19.

**Kata Kunci :** Covid-19, Force Majeure, Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang



## ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has caused losses in various fields, especially the economy. The impact of the Covid-19 pandemic resulted in only 58.95% of companies being able to operate normally, in fact as many as 82.45% of companies experienced a decrease in revenue. Based on Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning Stipulation of Non-Natural Disasters from the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as National Disasters as a legal basis for *force majeure*. With so many companies having an impact, an increase in bankruptcy and PKPU cases has occurred due to defaults committed by debtors due to Covid-19. For example, not carrying out obligations, such as paying debts due to a declining company's financial situation. As in the case of the PKPU Peace Decision Number: 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Where based on the case it is known that the Debtor cannot fulfill his performance obligations because one of the reasons is being affected by Covid-19. So based on these problems the author obtains the formulation of the problem, namely: Can the condition of the Covid-19 pandemic be a reason for delaying debt payments by debtors and how is the implementation of the PKPU conciliation decision Number 46/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst in the case of a request for postponement of debt payments. The research method used by the author in this study is normative juridical by adhering to theories and laws and regulations. As well as using a statutory problem approach and cases based on primary and secondary legal data sources. Equipped with qualitative analysis techniques. The results of the study show that the Covid-19 pandemic does not automatically eliminate debtors' obligations to fulfill their achievements when the Covid-19 pandemic is declared by the government to have ended. And in the PKPU decision, the fourth condition was not met because both debtors and creditors both suffered losses due to the Covid-19 pandemic.

**Keywords :** *Covid-19, Force Majeure, Postponement of Obligation Payments  
Debt*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	ii
BIODATA PENULIS .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR GRAFIK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian .....	6
1. Jenis Penelitian .....	6
2. Pendekatan Masalah .....	7
3. Sumber Data .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review) .....	11
B. Tinjauan Teori .....	14
Tinjauan Umum Terkait, Perjanjian, Wanprestasi, Force Majeure dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU .....	14
BAB III DEESKRIPSI HASIL TEMUAN .....	35
1. Debitor Mengalami Kerugian Selama Pandemi COVID-19 .....	35
2. Debitor Tidak Dapat Membayar Utang Sesuai Perjanjian.....	40

3. Permohonan Perdamaian ke PKPU Dalam Kasus Penundaan Utang Meningkat .....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	46
A. Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Penundaan Pembayaran Utang Bagi Debitor .....	46
B. Pelaksanaan Putusan Perdamaian PKPU Nomor 46/Pdt.Sus- PKPU/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst Dalam Kasus Permohonan Penundaan Pembayaran Utang .....	51
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Kartu Monitoring Tugas Akhir

Lampiran 2 : Bukti Cek Turnitin

Lampiran 3 : Berita Acara Hasil Ujian

## **DAFTAR GRAFIK**

1. Grafik 1 : Tambahan Kasus Covid-19 Asia dalam Sepekan (2021)
2. Grafik 2 : Rata-Rata Pendapatan Bersih Wirausaha Sebulan (Agustus 2019)
3. Grafik 3 : Pendapatan Masyarakat Indonesia Saat Pandemi Covid-19
4. Grafik 4 : Kendala Perusahaan Saat Pandemi
5. Grafik 5 : Jumlah Perkara PKPU yang Diterima Pengadilan Negeri (2018-2021)